



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Itsbat Nikah telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Ahmad Sanusi Bin Ilmi, Tempat Tanggal Lahir Bartim, 02 April 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Satpam PT. SEM Batu Bara, Tempat tinggal di RT. 03, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selama beracara beralamat di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Sebagai **Pemohon I**;

Masitah Binti Hudar, Tempat Tanggal Lahir Telang Baru, 05 juli 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di RT. 03, Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, selama beracara beralamat di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan perkara Nomor 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml, tanggal 24 Mei 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis, tahun 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama Muhammad Aini;

Hal. 1 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hudar bin Ali;
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Ahmad Jurjani
 - b. Ahmad Kusairimaharnya berupa uang sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 - a. Muhammad Saidillah bin Ahmad Sanusi, lahir pada Telang Baru, 09 September 1995;
 - b. Siti Rahmah Binti Ahmad Sanusi, tempat lahir Telang Baru, 06 Juli 1997;
 - c. Firman Hidayat Bin Ahmad Sanusi, tempat lahir Telang Baru, 07 Desember 1999;
 - d. Warikil Janah Binti Ahmad Sanusi, tempat lahir Telang Baru, 25 November 2002;
 - e. Fatahillah Bin Ahmad Sanusi, tempat lahir Telang Baru, 07 desember 2004;
 - f. Muhammad Nafis Bin Ahmad Sanusi, tempat lahir Telang Baru, 08 November 2007;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligini);
7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur dikarenakan letak Kantor Urusan Agama sulit dijangkau dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

10. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Sanusi Bin Ilmi**) dengan Pemohon II (**Masitah Binti Hudar**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tahun 1994 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon;

Bahwa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Hal. 3 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa Telang Baru, bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Akhmadi bin Dardie**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Telang Baru, RT 02, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon yang sudah puluhan tahun hidup sekampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1994 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, mengenai tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena waktu itu pengurusan buku nikah sangat sulit dilakukan karena belum ada jalan menuju kecamatan;
 - Bahwa proses ijab kabul dipimpin oleh penghulu bernama Muhammad Aini;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hudar bin Ali;

Hal. 4 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Jurjani dan Ahmad Kusairi;
 - Bahwa kedua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa mahar pernikahan adalah uang sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada larangan menikah (mahram) baik karena hubungan nasab, sesusuan atau karena hubungan semenda;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Muhammad Saidillah, Siti Rahmah, Firman Hidayat, Warikil Janah, Fatahillah, dan Muhammad Nafis;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;
2. **Abdul Sahid bin Matnur**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon yang sudah belasan tahun hidup sekampung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 90 an di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena waktu itu pengurusan buku nikah sangat sulit dilakukan karena belum ada jalan menuju kecamatan;

Hal. 5 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jabatkuul dipimpin oleh penghulu bernama Muhammad Aini;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hudar bin Ali;
- Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad Jurjani dan Ahmad Kusairi;
- Bahwa informasi mengenai wali nikah dan saksi nikah serta penghulu yang menikahkan para Pemohon hanya Saksi ketahui dari informasi tokoh masyarakat yang hadir sewaktu pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada larangan menikah (mahram) baik karena hubungan nasab, sesusuan atau karena hubungan semenda;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Muhammad Saidillah, Siti Rahmah, Firman Hidayat, Warikil Janah, Fatahillah, dan Muhammad Nafis;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan menyatakan tetap pada permohonan untuk disahkan pernikahan para Pemohon dan memohon agar Pengadilan Agama Tamiang Layang dapat menjatuhkan penetapan;

Hal. 6 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tahun 1994 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya mengenai bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah bermeterai cukup, sedangkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah *dinazzegele* yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti-bukti tersebut ternyata merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah para Pemohon hadirkan telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Hal. 7 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 177 Rv. jo. Pasal 1911 KUH.Perdata;

Menimbang, berkenaan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 telah menerangkan hal-hal yang relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, karena Saksi 1 memang hadir sewaktu akad nikah dilaksanakan. Sedangkan Saksi 2 meskipun menerangkan hal-hal yang relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, namun sebagian keterangannya bersumber dari cerita orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan Saksi 2 bersumber dari cerita orang lain, yang berarti bahwa kesaksian tersebut hanyalah berkualitas *de auditu*, namun karena dalil-dalil permohonan para Pemohon juga didukung oleh bukti P.3 dan P.4, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1994, tanpa bisa menyebutkan tanggal dan bulannya. Demikian juga Saksi para Pemohon juga tidak bisa menerangkan tanggal dan bulan pernikahan tersebut. Dengan demikian maka waktu pernikahan tersebut hanya ditetapkan tahunnya saja, mengingat peristiwa tersebut terjadi 25 tahun yang lalu dan terjadi di daerah yang budaya tertib administrasinya relatif belum baik;

Menimbang, dalam memeriksa pokok perkara ini Majelis telah mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 1994, di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa proses pernikahan para Pemohon dipimpin oleh penghulu bernama Muhammad Aini dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hudar bin Ali, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Ahmad Jurjani dan Ahmad Kusairi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan (*mahram*) untuk menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: Muhammad Saidillah, Siti Rahmah, Firman Hidayat, Warikil Jannah, Fatahillah, dan Muhammad Nafis;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena tidak mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa rukun dan syarat nikah yang diatur dalam hukum Islam telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai para Pemohon memiliki *i'tikad* baik untuk melaksanakan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar perkawinan para Pemohon bisa dicatat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, maka yang menjadi tolak ukur dalam memeriksa perkara *a quo* adalah apakah pernikahan yang para Pemohon lakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan hukum Islam. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan" ;

Menimbang, dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 10 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Sanusi bin Ilmi) dengan Pemohon II (Masitah binti Hudar) yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Desa Telang Baru, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Hal. 11 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Sogiannor, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
5. Pengumuman	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp	6000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	496.000,00

Hal. 12 dari 12. Pen. No. 0017/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)